



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT BADAN**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 34833486 EXT. 7011; FAKSIMILE (021) 3812763
WEBSITE: www.fiskal.kemenkeu.go.id EMAIL: ikp@fiskal.depkeu.go.id

SIARAN PERS

Rangkaian Pertemuan APEC *Finance Ministers' Meeting* (FMM) 2015

Lima, Peru, 13-15 Oktober 2016

Pada tanggal 13-15 Oktober 2016, bertempat di Lima, Peru telah diselenggarakan Rangkaian Pertemuan APEC *Finance Ministers' Meeting* (FMM) 2016. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari (i) APEC *Senior Finance Officials' Meeting* (SFOM), membahas *draft Joint Ministerial Statement* (JMS), dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2016; (ii) APEC *Finance Deputies' Meeting*, membahas agenda *Finance Ministers Process* (FMP) 2016 dan *draft final JMS*, dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2016; dan (iii) APEC *Finance Ministers' Meeting*, merupakan pertemuan puncak APEC FMP, dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Oktober 2016.

Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari 21 Ekonom APEC beserta perwakilan dari Lembaga Internasional seperti APEC *Business Advisory Council* (ABAC); APEC *Policy Study Unit* (PSU); *Asian Development Bank* (ADB); *International Monetary Fund* (IMF); *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD); Bank Dunia; dan *Global Infrastructure Hub*. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan dengan anggota delegasi terdiri dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Peru, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), BKF, staf Kementerian Keuangan dan KBRI Peru.

Pada keketuaannya tahun ini, Peru mengangkat tema "*Strengthening Public Policy for an Integrated and Resilient Asia-Pacific Region*" dengan agenda utama yang dibahas antara lain: (i) modernisasi *Finance Ministers' Process* dan Implementasi *Cebu Action Plan* (CAP), (ii) pengembangan inisiatif-inisiatif infrastruktur; (iii) kebijakan-kebijakan inklusi keuangan; (iv) kebijakan-kebijakan pembiayaan risiko bencana dan asuransi; dan (v) implementasi proyek BEPS. Selain itu, juga dibahas agenda perekonomian global dan regional. Hasil-hasil (*deliverables*) APEC FMM 2016 dituangkan dalam *Joint Ministerial Statement* (JMS) Para Menteri Keuangan APEC.

Joint Ministerial Statement

Hasil rangkaian pertemuan APEC FMM 2016 terangkum dalam *Joint Ministerial Statement* Para Menteri Keuangan APEC yang berisi antara lain:

- a. Kesepakatan untuk melaksanakan strategi modernisasi proses Menteri Keuangan APEC dan implementasi inisiatif *Cebu Action Plan*.
- b. Perekonomian global masih menghadapi permasalahan dan tantangan, yang ditandai oleh harga komoditas yang rendah, kondisi finansial yang tidak stabil, perlambatan dalam perdagangan yang diikuti oleh kebijakan proteksi, dan *rebalancing* dari beberapa ekonomi. Untuk merespon hal tersebut, Para Menteri sepakat bahwa ekonomi APEC perlu menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia (moneter, fiskal dan struktural), baik secara individual maupun kolektif. Dari sisi fiskal, akan terus menerapkan kebijakan yang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT BADAN

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 34833486 EXT. 7011; FAKSIMILE (021) 3812763
WEBSITE: www.fiskal.kemenkeu.go.id EMAIL: ikp@fiskal.depkeu.go.id

fleksibel, dengan memperhatikan kondisi ekonomi jangka pendek, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sambil memastikan kesinambungan fiskal. Sementara di sisi moneter, ekonomi APEC akan menahan diri terhadap kebijakan devaluasi yang kompetitif, menolak segala bentuk proteksionisme dan tidak menargetkan nilai tukar untuk tujuan kompetitif.

- c. Terkait dengan struktural, Para Menteri Keuangan menegaskan kembali komitmennya untuk mengatasi pelambatan ekonomi dan mencari sumber-sumber pertumbuhan baru yang potensial, termasuk melalui aksi-aksi reformasi struktural baru dan memenuhi komitmen reformasi yang ada.
- d. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur kawasan, APEC FMP akan memperkuat kerja sama dengan *Global Infrastructure Hub* (GIH) melalui Rencana Aksi Kolaborasi berupa pembentukan *PPP Knowledge Portal*, yaitu sebuah *online repository* dari proyek-proyek infrastruktur diterima oleh komunitas internasional (*best practice*). Rencana aksi ini menetapkan kerangka kerja non-eksklusif yang mempromosikan pelaksanaan kegiatan untuk mengejar peningkatan kualitas dari peluang investasi.
- e. Para Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya penerapan jaringan *APEC PPP Center* untuk bertukar informasi, berbagi praktik terbaik dan membantu menyelaraskan standar antar PPP Center di kawasan APEC. Hal tersebut sejalan dengan keputusan Para Menteri Keuangan APEC tahun 2013.
- f. Para Menteri Keuangan mengakui pentingnya kerangka institusional untuk mengembangkan pasar keuangan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi semua segmen masyarakat. Dalam hal ini, desain dan implementasi strategi nasional sangat penting untuk menjamin kelangsungan kebijakan inklusi keuangan dan memberikan kontribusi untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Dalam hal ini, program kerja APEC FMP akan difokuskan pada isu-isu promosi lingkungan digital untuk jasa keuangan, pengembangan mekanisme pembiayaan untuk UMKM, serta desain dan implementasi kebijakan literasi keuangan.
- g. Para Menteri Keuangan mengakui bahwa relevansi pengumpulan data pada komponen risiko (bahaya, eksposur, dan kerentanan) dari bencana dan asuransi bencana, merupakan suatu tahap awal untuk meningkatkan penetrasi asuransi dalam mitigasi bencana. Disepakati perlunya pengembangan teknik dan instrumen tingkat lanjut untuk mengatasi dan mengurangi biaya risiko bencana.
- h. APEC FMP membentuk *Working Group on Regional Disaster Risk Financing Solutions*, didukung oleh Bank Dunia, untuk membantu ekonomi APEC dalam mengidentifikasi dan menerapkan mekanisme pembiayaan risiko bencana regional, serta meningkatkan penetrasi asuransi. *Working Group* bertugas untuk mengembangkan metodologi standar untuk menyusun database eksposur bencana untuk aset pemerintah, serta kerugian akibat bencana alam dan metodologi standar untuk database eksposur dan klaim asuransi.
- i. Para Menteri Keuangan juga berkomitmen untuk berupaya mengatasi penghindaran dan penggelapan pajak di kawasan Asia Pasifik, upaya kritis melalui pertukaran informasi



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT BADAN**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 34833486 EXT. 7011; FAKSIMILE (021) 3812763
WEBSITE: www.fiskal.kemenkeu.go.id EMAIL: ikp@fiskal.depkeu.go.id

antar administrator pajak. Mendorong ekonomi APEC untuk memperkuat integritas sistem pajak mereka dengan mengadopsi standar transparansi perpajakan internasional dan instrumen yang relevan seperti *OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC)* dan *OECD Competent Authority Agreement on the Exchange of Country by Country Reports*.

- j. Para Menteri Keuangan juga menyambut baik pembentukan Kerangka Inklusif *Base Erosion Profit Shifting (BEPS)* dan meminta dukungan dari organisasi internasional dan negara-negara maju untuk membantu membangun kapasitas dan penerapan kerangka hukum yang diperlukan dalam rangka implementasi BEPS.

Rangkaian pertemuan ini sekaligus menutup Keketuaan APEC Peru 2016. Keketuaan APEC 2017 akan dipegang oleh Viet Nam, dan APEC FMM 2017 rencananya akan dilaksanakan di Quang Nam - Da Nang pada bulan Oktober tahun 2017.

Bilateral Meeting

Di sela-sela pertemuan APEC FMM 2016, Ketua Delegasi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Hong Kong untuk membahas kondisi perekonomian global terkini dan *sharing* pengalaman terkait respon kebijakan pemerintah kedua ekonomi, termasuk program *Tax Amnesty* di Indonesia. Selain itu, delegasi Indonesia dan Hong Kong juga berdiskusi mengenai implementasi *FTA ASEAN-Hong Kong*, kebijakan inklusi keuangan, dan pembentukan *Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO)* di Jakarta.

Jakarta, 21 Oktober 2016

Informasi lebih lanjut hubungi:
Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lt. 7
Jalan DR.Wahidin Nomor 1, Jakarta, 10710
Telepon : (021) 3451218
Faksimile : (021)3451205